



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRANSISKUS XAVERIUS HARJOYO
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 725688

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.649.524.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 473.826.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 696.498.000
3. Tanah Seluas 2995 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 479.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 481.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HIBAH TANPA AKTA Rp. 370.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.244.237.591

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 609.414.413

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.989.876.004

III. HUTANG Rp. 722.753.827

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.267.122.177



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.